

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Oleh : M. Rizwan

Wawanherndes194@gmail.com

Pembimbing : Dr. Achmad Hidir, M.Si

achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat korelasi status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pemberian suara (votting). Desain penelitian ini adalah kuantitatif dimana menggunakan pendekatan *non probability sampling*. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah lembar koesioner yang di serahkan kepada para responden. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang di sajikan dalam bentuk tabel kemudian di berikan penjelasan. Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini, status sosial ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 dan faktor penghambat yang paling berpengaruh terhadap pemberian suara (votting) yaitu hilangnya rasa kepercayaan terhadap politik, dan faktor pendukung yang paling berpengaruh terhadap pemberian suara (votting) yaitu memiliki sikap sadar akan tanggung jawab selaku warga Indonesia yang baik

Kata Kunci : Partisipasi, Politik, dan Sosial Ekonomi.

**COMMUNITY PARTICIPATION IN ELECTIONS
KARIMUN DISTRICT 2015**

By : M. Rizwan

Wawanhermandes194@gmail.com

Supervisor : Dr. Achmad Hidir, M.Si

achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Campus Bina Widya, H.R. Soebrantas St. Km. 12,5 Simpang Baru, Panam,

Pekanbaru 28293-Phone/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to determine the level of correlation of socio-economic status to the political participation of the community of Sungai Lakam Barat Village in the General Election of Head and Deputy Regional Head of Karimun Regency in 2015 and also to find out the inhibiting factors and supporting factors of voting. The design of this study is quantitative where it uses a non probability sampling approach. The data collection technique used was questionnaire sheets which were submitted to the respondents. The analysis used is quantitative analysis which is presented in table form and then explained. Based on the results of this research, the socio-economic status influences the political participation of the Sungai Lakam Barat District Community in the 2015 General Election and Deputy Head of Karimun Regency and the most influential inhibiting factors for voting are loss of trust in politics, and the most influential contributing factor to voting is having an awareness of responsibility as a good Indonesian citizen

Keywords: Participation, Politics, and Social Economy

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga di dalamnya memiliki hak setara di dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka, sistem pemerintahan yang berjalan/diselenggarakan atas dasar “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” artinya di dalam sistem pemerintahan demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, sekalipun untuk memilih pemimpin yang akan mengurus negara tersebut atau biasanya di kenal dengan sebutan Presiden.

Salah satu bentuk dari sistem pemerintahan demokrasi yaitu terciptanya suatu bentuk pemilihan untuk memilih seorang pemimpin yang akan memikul tampuk pemerintahan, di mana pemilihan tersebut di laksanakan dengan rakyat sebagai pemilih pemimpin tersebut, artinya rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin nantinya dan kekuasaan tidak lagi berada di tangan pemerintah, pemilihan seperti biasanya kita kenal dengan sebutan Pemilihan Umum yang mana pemilihan. Salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan seperti ini yaitu negara

Indonesia, di negara Indonesia sendiri pemilihan umum telah lama di lakukan di mana pemilihan yang pertama kali di laksanakan negara Indonesia yaitu sekitar tahun 1955, di negara Indonesia pemilihan umum bukan hanya di selenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden saja akan tetapi pemilihan umum diselenggarakan juga untuk memilih Anggota Lembaga Legislatif, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa kita kenal dengan PILKADA, dan banyak lagi yang menggunakan sistem pemilihan umum untuk memilih seorang pemimpin.

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pada hakikatnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya partisipasi masyarakat/rakyat, karena yang memegang kekuasaan atau wewenang untuk memilih pemimpin tersebut berada di tangan masyarakat/rakyat itu sendiri, menurut Mc Closky¹ partisipasi

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 367.

politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Akan tetapi pada masa sekarang ini pemahaman tentang hak mengikuti pemilihan umum telah mengalami pergeseran di mana hal ini dibuktikan dengan setiap diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) baik itu pemilihan legislatif, pemilihan bupati/wali kota, pemilihan gubernur bahkan di dalam pemilihan presiden selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih(golput), Golongan putih atau lebih dikenal sebagai golput merupakan orang-orang yang tidak ikut memilih, istilah ini muncul di Indonesia sekitar tahun 1971² yang mana merupakan pemilihan umum pertama di era orde baru, disebut golongan putih karena pada masa itu golput hanya diartikan ikut memilih akan tetapi mencoblos bagian putih di kertas suara, namun pada masa itu jarang ada yang berani datang ketempat pemungutan suara karena takut ditandai, sehingga pada masa sekarang ini orang menganggap golput itu tindakan tidak ikut memilih dengan cara tidak datang ketempat-tempat pemungutan suara, perilaku ini mengacu sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu orde baru hal ini dikarenakan rakyat menilai tidak demokratis, pada masa reformasi seperti sekarang ini pemaknaan istilah golput telah mengalami pergeseran, hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigma di mana pada masa orde baru memilih bukanlah kewajiban bergeser

kepada hak pilih untuk ikut atau tidak di dalam pemilu atau pilkada, seiring dengan pergeseran paradigma tersebut istilah golput pada masa sekarang ini merupakan penyebutan bagi orang-orang yang tidak ikut di dalam pemilu atau pilkada, berdasarkan hasil pemilu dan pilkada yang didapat tidak mungkin terdeteksi dengan baik, sebab hasil yang didapat tidak pernah disertai informasi atau alasan mengapa pemilih tidak ikut memilih.

Pada tanggal 09 Desember 2015 yang lalu, masyarakat Kabupaten Karimun telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dengan mengutamakan suara rakyat dengan sistem demokrasi langsung, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 yang lalu di Kabupaten Karimun, banyak sekali masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersebut, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pemilih yang datang langsung tempat pemungutan suara(TPS) yang telah disediakan.

Tabel 1.1
Data Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Karimun
Pada Tanggal 9 Desember 2015
Sumber: KPU Kabupaten Karimun 2015

² Sejarah golongan putih (golput) di akses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/golongan_putih, pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 10:26.

Sehubungan dengan ulasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai masyarakat yang telah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Karimun pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, khususnya pada masyarakat Kecamatan Karimun, lebih tepatnya masyarakat di Kelurahan Sungai Lakam Barat, di mana peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat dari partisipasi politik dan penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh status sosial ekonomi terhadap jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun 9 Desember 2015 yang lalu

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis ingin mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi sewaktu berlangsungnya Pilkada Kabupaten Karimun pada 2015 yang lalu maka penulis mengangkat bebrapa rumusan masalah yang mana nantinya akan dilakukan penelitian di lapangan nantinya, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Sungai Lakam Barat?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang mempengaruhi pemberian suara (votting) masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini nantinya yaitu:

1. Untuk mengetahui korelasi antara status sosial ekonomi terhadap jumlah patisipasi

NO	KECAMATAN	JUM LAH DPT	TOTAL PENGGUNA HAK PEMILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	PERSEN TASE PARTISIPASI %	PERSENTASE TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	BELAT	5.066	3.122	1.944	61.62 %	38.37 %
2	BURU	7.528	4.398	3.130	58.42 %	41.57 %
3	DURAI	4.679	3.005	1.674	64.22 %	35.77 %
4	KARIMUN	36.162	15.610	20.552	43.16 %	56.83 %
5	KUNDUR	23.406	12.032	11.374	51.40 %	48.59 %
6	KUNDUR BARAT	13.325	8.068	5.257	60.54 %	39.45 %
7	KUNDUR UTARA	9.044	5.206	3.838	57.56 %	42.43 %
8	MERAL	31.077	14.638	16.439	47.10 %	52.89 %
9	MERAL BARAT	8.793	5.617	3.176	63.88 %	36.11 %
10	MORO	13.219	9.348	3.871	70.71 %	29.28 %
11	TEBING	18.325	10.094	8.231	55.08 %	4.91 %
12	UNGAR	4.478	2.738	1.740	61.14 %	38.85 %
TOTAL		175.100	93.876	81.224	53.61 %	46.38 %

politik masyarakat Sungai Lakam Barat pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 yang lalu

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan faktor pendukung masyarakat dalam pemberian suara (votting) pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karimun 2015 yang lalu

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum.adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis di harapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta manfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi.
2. Manfaat Praktis
Peneltian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta

temuan dilapangan dalam meningkatkan daya, kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari peneltian tersebut, dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

9	
8	Menduduki jabatan tertentu
7	Mencari jabatan politik
6	Keanggotaan aktif organisasi politik
5	Keanggotaan pasif organisasi politik
4	Anggota aktif organisasi semi politik
3	Anggota pasif organisasi semi politik
2	Partisipasi di dalam rapat umum
1	Ikut serta di diskusi politik
	Votting (pemberian suara)

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Politik

Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan cara ikut memilih di dalam setiap terselenggaranya suatu pemilihan umum baik itu secara langsung maupun tidak langsung, selain dari ikut memilih di dalam setiap pemilu partisipasi politik juga dapat di tandai dengan menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya. Menurut (Herbert Mc Closky) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa , dan secara langsung dan tidak langsung, dalam

proses pembentukan kebijakan umum³. Sukarela disini berarti tidak terdapatnya paksaan yang memaksa si pemilik hak partisipasi tersebut.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff di dalam bukunya pengantar sosiologi politik⁴ tingkat partisipasi seseorang dapat dibagi kedalam 9, tingkatan yang mana setiap tingkatnya memiliki perannya yang berbeda, adapun tingkatan partisipasi tersebut yaitu

Bentuk

Keterangan

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff partisipasi politik yang paling rendah yaitu votting di mana disini penulis meletakkan posisi votting yaitu pada nomor 1 yaitu posisi yang terendah di dalam partisipasi politik dan posisi yang tertinggi di tulis dengan nomor 9, pemberian suara yang mana biasa dilakukan pada saat berlangsungnya suatu pemilihan umum, walaupun votting berada pada tingkat partisipasi yang terendah akan tetapi tidak bisa di pungkiri bahwasanya votting merupakan bentuk partisipasi yang paling penting karena votting bisa menentukan siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan nantinya.

Menurut Efriza di dalam bukunya yang berjudul “*political explore* : sebuah kajian ilmu politik”. Ada 4 faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi

³Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 367.

⁴ Michael Rush dan Philip, Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik (Terjemahan Kartini Kartono)*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 124.

masyarakat di dalam pemilihan⁵. adapun 4 faktor tersebut adalah:

1. Faktor psikologi

Golput yang bersumber dari faktor psikologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku golput disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Hal tersebut dikarenakan apa yang diperjuangkan kandidat atau parpol tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung. Ciri-ciri dari perilaku golput berdasarkan faktor psikologis ini umumnya diperoleh sejak lahir (bahkan lebih bersifat keturunan). Faktor yang lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitik beratkan faktor orientasi kepribadian, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, dan alienasi. Secara

teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelasan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sengaja ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik, atau adanya perasaan bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Aliensi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Bahkan mereka dianggap sebagai suatu yang mempunyai kosekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternative aksi politik, seperti melalui kerusakan, kekacauan, demonstrasi, dan semacamnya

2. Faktor sistem politik

Hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap persentase kehadiran dan ketidak hadiran seseorang dalam bilik suara. Faktor sistem politik berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasa pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang

⁵ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian*

Ilmu Politik (Bandung: Alfabeta, 2012), 156.

sehat. Sistem pemilu Proposional juga dinilai tidak menjamin kedekatan antara wakil dan yang terwakili.

3. Faktor Kepercayaan Politik

Pada literatur ilmu politik, konsep kepercayaan politik banyak digunakan untuk menjelaskan ketidakaktifan (*inactivity*) seseorang dalam dunia politik. Fenomena meningkatnya golput harus dipandang dalam dua perspektif. Pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan kandidat, yang kemudian berakibat pada perspektif kedua, keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan. Padahal, tanpa legitimasi warga negara sesungguhnya sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada. Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi perasaan keterasingan.

4. Faktor Latar Belakang Satus Sosial-ekonomi

Setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel status sosial-ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya,

jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih. Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih:

- a. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi pada pemilu. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- b. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pension kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.
- c. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. disamping menginginkan

seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan dalam sebuah tulisannya.

- d. Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang latar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah”

Menurut Mibrath di dalam Maran⁶ menyebutkan lima faktor pendukung partisipasi, adapun lima faktor tersebut yaitu :

1. Perangsang politik
Seseorang akan aktif berpartisipasi di dunia politik jika orang tersebut mendapat rangsangan politik, rangsangan di sini berupa diskusi-diskusi yang berkaitan dengan politik melalui media massa atau melalui diskusi formal maupun informal.
2. Karakteristik pribadi seseorang
Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan sosial budaya, biasanya mau ikut terlibat di dalam aktivitas politik.
3. Karakteristik sosial

Faktor ini berkaitan dengan status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang, seseorang akan ikut berpartisipasi jika terdapat kesamaan dengan dirinya.

4. Situasi atau lingkungan politik
Lingkungan politik yang kondusif akan membuat orang dengan senang hati ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada lingkungan politik yang otoriter, lingkungan yang sering di isi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya masyarakat akan menjauh dari dunia politik.
5. Pendidikan politik
Pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam dunia politi, seseorang yang telah mendapatkan dan pernah mengenyam dunia pendidikan politik akan lebih aktif berpartisipasi di dunia politik.

Status Sosial Ekonomi dalam Partisipasi Politik

Status sosial ekonomi merupakan sebuah lapisan-lapisan yang terdapat di dalam masyarakat, status sosial ekonomi dapat juga diartikan sebagai tingkatan atau kedudukan seseorang di dalam kelompok masyarakat tersebut,

Mayor Polak⁷ mengartikan status sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok serta di dalam sebuah masyarakat. Begitu

⁶ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007),156.

⁷ Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1979), 187.

pula menurut Abdulsyani⁸ status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang di dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi

Lapisan-lapisan yang terdapat di dalam masyarakat atau bisa disebut pula sebagai Status sosial ekonomi pada dasarnya dapat diukur dengan pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang menggunakan variable yang mudah diukur secara statistik⁹. Dimana ketiga cara tersebut berfungsi untuk menggolong-golongkan atau menempatkan posisi masyarakat tersebut yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan bisa digunakan sebagai variabel untuk mengukur dan menggolongkan anggota-anggota masyarakat di dalam suatu lapisan, semakin tinggi pendidikan seseorang di dalam lapisan tersebut maka akan semakin tinggi pula kedudukannya di dalam lapisan tersebut, begitu pula sebaliknya. Pendidikan juga merupakan salah satu usaha manusia untuk meningkatkan keperibadiannya dengan jalan membina potensi diri sendiri, yang berupa rohani(cipta,rasa dan karsa) dan jasmani(panca indra dan

keterampilan¹⁰.Ukuran ilmu pengetahuan biasanya bisa diukur berdasarkan tingginya tingkat pendidikan yang di kecapinya, hal ini didasarkan pada penegertian bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin kritis pula pola pemikirannya yang mana jika di dalam partisipasi politik akan sangat membantu karena dapat mengerti akan pentingnya mengikuti partisipasi di dalam pemilihan umum

2. Pekerjaan

jenis pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lainnya di dalam suatu kelompok masyarakat tentu saja tanpa kita sadari akan menimbulkan penggolongan-penggolongan atau pengelompokan dalam kelompok masyarakat itu sendiri, pengelompokan tersebut pun akan menentukan status individu itu sendiri di dalam kelompok masyarakat itu sendiri.

3. Penghasilan

Jenis penghasilan atau pendapatan seseorang di dalam suatu lapisan masyarakat tentu saja berbeda-beda satu dengan lainnya, hal ini juga yang mendorong untuk penghasilan dijadikan suatu variable di dalam menggolongkan anggota-anggota masyarakat tersebut, semakin tinggi penghasilan atau pendapatan yang diperoleh maka akan

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 223.

⁹ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 102.

¹⁰ Budioro, B. *Pendidikan (Penyuluhan) Kesehatan Masyarakat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 53.

semakin tinggi pula kedudukannya di dalam lapisan tersebut, begitu pula sebaliknya

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data DPT pada masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Karimun, Kecamatan Karimun, dan lebih tepatnya di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Pemilihan lokasi di Kelurahan Sungai Lakam Barat di karenakan Kelurahan Sungai Lakam Barat merupakan kelurahan yang paling banyak sekali jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput)

Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi yang peneliti ambil disini adalah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2015 yaitu sebesar 8.483 (Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) jiwa.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut¹¹. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Sungai Lakam Barat pada Pilkada 2015, mengingat banyaknya jumlah populasi di dalam penelitian ini yaitu sebesar 8.483

(delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga) maka peneliti hanya menarik sampel dari jumlah populasi yaitu sebesar 1% dengan rumus seperti berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{bagian}}{\text{seluruh}} \times 100$$

$$(\%) = \frac{1}{100} \times 8.483$$

$$(\%) = 84.83$$

$$(\%) = 85$$

Setelah di lakukan pencarian jumlah sampel dengan menggunakan rumus di atas, maka di dapatkanlah jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebesar 85 jiwa.

Jenis Dan Sumber Data

Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari informasi melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti di lapangan dari subjek yang bersangkutan. Data ini nantinya di kumpulkan dari responden yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada, data primer di peroleh langsung dari lapangan dengan metode Quesioner.

Data sekunder

Data sekunder berupa data yang mendukung data primer yang di peroleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. data yang di gunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan di teliti di lapangan penelitian. Penelitian ini mendapatkan data sekundernya dari KPU Kabupaten Karimun dan kantor Kecamatan Karimun. Berupa data daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun 2015 Yang Lalu.

Teknik Penumpulan Data

Angket (Kuesioner)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Menurut (Sugiyono,

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*

(Bandung: Alfabeta, 2006), 52.

2009)kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien agar peneliti tahu apa yang bisa diharapkan.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan melalui suatu media tertulis dan media lainnya¹². Dalam melakukan dokumentasi penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa gambar-gambar saat dilaksanakannya penelitian, di mana berguna untuk melengkapi data data yang diperlukan untuk permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang

data tersebut di analisa secara kuantitatif menggunakan rumus korelasi pearson product moment, dengan rumus:

$$r = \frac{n\sum(XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = angka indeks korelasi

n = sampel

$\sum XY$ = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

$\sum X$ = jumlah seluruh skor X

$\sum Y$ = jumlah seluruh skor Y

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat skor X

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat skor Y

Pelaksanaan ketika memproses data penulis menggunakan batuan perangkat komputer dengan program SPSS (statistical program society science) versi 2.2 *for windows* dan di akhiri dengan pearikan kesimpulan yag juga merupakan fakta di mana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

setelah di lakukan penelitian di lapangan lebih tepatnya di Kelurahan Sungai Lakam Barat kepada 85 responden, maka di dapatkan lah hasilnya yang mana akan di jelaskan melalui tabel berikut ini

Tabel Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015

No	Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	Persentase
		Laki-Laki		Perempuan			
		Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih		
1	17-22 Tahun	1			2	3	3.53 %
2	23-28 Tahun		3	4		7	8.24 %
3	29-34 Tahun	4	3	3		10	11.7 6%
4	35-40 Tahun	5	2	10	2	19	22.3 5%
5	41-46 Tahun	3	5	2	3	13	15.2 9%
6	47 tahun ke atas	11	8	11	3	33	38.8 2%
Jumlah		24	21	30	10	85	99.9 9%

terkumpul.mentabulasi Kemudian data-

¹² Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 31.

Sumber : data olahan lapangan 2018

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat dan mengetahui jumlah responden yang menggunakan hak pilihnya dan rersponden yang tidk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun pada tahun 2015, disini peneliti ingin menyimpulkan bahwasanya di dalam tabel tersebut dimana jumlah yang menggunakan hak

No	Umur	Jenis Kelamin												Jumlah	Persentase	
		Laki-Laki						Perempuan								
		Menggunakan hak pilih			Tidak menggunakan hak pilih			Menggunakan hak pilih			Tidak menggunakan hak pilih					
		T	S	R	T	S	R	T	S	R	T	S	R			
1	17-22 tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3.53%
2	23-28 tahun	-	-	-	-	1	2	1	-	3	-	-	-	7	8.24%	
3	29-34 tahun	-	-	4	-	1	2	1	1	1	-	-	-	10	11.76%	
4	35-40 tahun	-	-	5	-	1	1	-	1	9	-	-	2	19	22.35%	
5	41-46 tahun	1	-	2	-	1	4	-	-	2	1	1	1	13	15.29%	
6	47 tahun ke atas	1	1	9	-	3	5	-	4	7	1	1	1	33	38.82%	
Jumlah		2	1	2	0	7	1	2	6	22	2	4	4	85	99.99%	

di sebabkan oleh Karena, responden yang berjenis kelamin laki-laki bekerja pada hari tersebut.

Tabel Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pemberian Suara (votting) Pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015

Sumber : data olahan lapangan 2018

Keterangan:

- ▶ T (Tinggi)
- ▶ S (Sedang)
- ▶ R (Rendah)

pilihnya pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Karimun 2015 lebih mendominasi ketimbang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala Kabupaten Karimun Tahun 2015 tersebut, dan pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 tersebut responden yang mendominasi menggunakan hak pilihnya yaitu yang berjenis kelamin perempuan yang telah ber umur 47 tahun ke atas, ini mungkin di sebabkan yang berjenis kelamin perempuan mayoritasnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga jadi memiliki banyak waktu luang yang bisa di gunakan untuk menggunakan hak pilihnya, dan jika kita lihat kembali tabel 5.6, maka akan di ketahui bahwa jenis kelamin yang mendominasi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah kabupaten kakrimun tahun 2015 yaitu responden dengan ber jenis kelamin laki-laki dan yang ber umur 47 tahun ke atas, ini mungkin juga

Berdasarkan penjabaran pada tabel tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwasanya pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 yang lalu, jumlah responden yang menggunakan hak suara (votting) lebih di dominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan, hai ini tentu saja memiliki hubungannya dengan salah satu indikator status sosial ekonomi yaitu pekerjaan, di mana pada pembahasan sebelumnya telah di jelaskan dimana hampir seluruh responden yang berjenis kelamin perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga (IRT), ini tentu saja memberikan kelebihan terhadap responden yang berjenis kelamin perempuan untuk menggunakan hak suara (votting) mereka, Karena seperti yang kita ketahui dimana jenis pekerjaan ibu rumah tangga (IRT) memiliki banyak waktu yang luang

sehingga bisa para responden yang berjenis kelamin perempuan tersebut untuk menggunakan waktu luang tersebut untuk menggunakan hak suara (voting) mereka.

Begitu pula sebaliknya untuk jumlah yang tidak menggunakan hak suara (votting) pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah

Tabel Uji Korelasi Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik

Correlations	Status Sosial Ekonomi	Partisipasi Politik
Status Pearson Correlation	1	.018
Sig. (2-tailed)		.867
N	85	85
Partis Pearson Correlation	.018	1
Sig. (2-tailed)	.867	
N	85	85

Kabupaten Karimun Tahun 2015 yang lalu, dimana yang mendominasi yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini tentunya memiliki hubungannya terhadap salah satu indikator status sosial ekonomi yaitu pekerjaan, dimana seperti yang kita ketahui pada pembahsan sebelumnya yaitu tentang jenis pekerjaan responden, dimana sebagian responden bekerja pada jenis pekerjaan buruh harian lepas, dimana jenis pekerjaan buruh harian lepas ini, Seperti yang kita ketahui tidak begitu terikat akan waktu libur/tanggal merah, mereka para pekerja buruh harian akan tetap bekerja, berbeda dengan pada pekerja/karyawan perusahaan ataupun PNS, dimana biasanya para pekerja pada jenis pekerjaan buruh harian lepas ini akan di berikan gaji/upah jika mereka bekerja, karena para pekerja buruh harian lepas

ini tidak memiliki sistem penggajian/upah yang tetap setiap bulannya, berbeda dengan pekerja/karyawan perusahaan ataupun PNS dimana mereka mendapatkan upah/gaji yang tetap setiap bulannya dan nominal gaji/upah yang mereka teriman tidak akan berpengaruh terhadap waktu libur/tanggal merah, jadi wajar saja mengapa banyak para responden yang bekerja pada jenis pekerjaan buruh harian lepas ini banyak yang tidak menggunakan hak suara (votting) pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Karimun 2015 yang lalu, Karen jika mereka menggunakan hak suara mereka untuk datang ke tempat pemugutan suara pada hari tersebut, mereka tentu saja tidak akan mendapatkan upah/gaji pada hari tersebut.

Pada uji korelasi berikut ini, status sosial ekonomi merupakan variabel X dan partisipasi politik merupakan variabel Y, berikut adalah hasil dari uji korelasi tersebut

Setelah dilakukan uji korelasi antara status sosial ekonomi (X) terhadap partisipasi politik (Y), maka di peroleh hasil tingkat korelasinya yaitu sebesar 0.018. Dari hasil tersebut peneliti menarik kesimpulan, bahwasanya korelasi antara status sosial ekonomi (X) terhadap partisipasi politik (Y) masuk kedalam kategori tingkat hubungan yang sangat rendah yaitu antara (0.00 – 0.199).

Dari hasil tersebut maka peneliti menarik kesimpulan dimana variabel status sosial ekonomi (X) memiliki pengaruhnya terhadap keikutsertaan responden di dalam partisipasi politik (Y), akan tetapi pengaruh yang diberikan oleh status sosial ekonomi (X) sangat rendah terhadap partisipasi politik (Y).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan apa yang di jelaskan pada pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Korelasi status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015. Tingkat pengaruh antara kedua variabel berada pada kategori sangat lemah yaitu 0,018. Dengan hasil tersebut berarti H_0 di tolak, ini berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi searah antara status sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat terhadap partisipasi politik pada Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015.
2. Hasil penelitan tentang partisipasi politik pada masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat menunjukkan bahwa, dari 85 responden terdapat 23 reponden dengan persentase 27,06% pada kategori rendah (mengikuti 1 partisipasi– tidak mengikuti partisipasi). Dan sebanyak 37 responden dengan persentase 43,53% pada kategori sedang (mengikuti 2 partisipasi politik). Dan yang terakhir yaitu sebanyak 25 responden dengan persentase 29,41% pada kategori tinggi (mengikuti 3 partisipasi politik).

Saran

1. Kepada pihak yang terkait yaitu KPU Kabupaten Karimun, agar lebih memaksimalkan lagi untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia politik, terutama partisipasi politik di bagian pemberian suara (Votting). Kepada daerah-daerah yang mana jumlah golputnya tinggi.

2. Kepada masyarakat sungai lakam barat, agar bisa lebih meningkatkan lagi partisipasinya di dalam dunia politik, terutama sekali untuk ikut menggukan hak pilihnya, karena seperti yang telah di terangkan pada latar belakang, dimana negara kita negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang mana pihak yang memiliki kekuasaan terbesar yaitu rakyat sipil/masyarakat, jadi jangan pernah mensia-siakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budioro, B. 2007. *Pendidikan (Penyuluhan) Kesehatan Masyarakat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Efriza. 2012. *Political explore : Sebuah kajian ilmu politik..* Alfabeta. Bandung.
- Maran, Rafael Raga. 2007, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Polak, Mayor. 1979, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru.
- Rush, Michael dan Philip, Althoff. 1986, *Pengantar Sosiologi Politik (Terjemahan Kartini Kartono)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sarjono, Haryadi Dan Winda, Julianti. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar* . Jakarta: Salemba Empat.

Sayid, syekh. 2011, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada.

Setiadi, Elly Dan Kolip, Usman. 2013. *Pegantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2006, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kumanto, Sunarto. 2004, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady, 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.